

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Budi Juliardi

(Dosen Unit MKDK/MKDU STKIP PGRI Sumatera Barat

e-mail: rizhan_budi@yahoo.com

***Abstrack:** This research is critical of the analsis of literature (libraries) on character education. Character education is one formulation of the right to build the character of the young generation. The condition of the younger generation of Indonesia today is in a position that is quite disturbing. A variety of cases involving younger generation makin showed that moral degradation has occurred indicating the younger generation no longer has good character. To that end, character education is urgently needed. One of the means to implement the values in character education to the younger generation is through civic education. Citizenship education is expected to revive the character of learners progressively degenerate toward characters that correspond to the values of Pancasila.*

Keywords: *education, character, Citizenship Education.*

Abstrak: Penelitian ini merupakan analisis kritis terhadap literatur (kepuustakaan) mengenai pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan salah satu formulasi yang tepat untuk membangun karakter generasi muda. Kondisi generasi muda Indonesia dewasa ini berada dalam posisi yang cukup meresahkan. Berbagai kasus yang melibatkan generasi muda makin memperlihatkan bahwa telah terjadi degradasi moral yang menandakan generasi muda tidak lagi memiliki karakter yang baik. Untuk itu, pendidikan karakter sangat dibutuhkan. Salah satu sarana untuk mengimplementasikan nilai-nilai dalam pendidikan karakter kepada generasi muda adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu menghidupkan kembali karakter peserta didik yang semakin merosot menuju karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: pendidikan, karakter, Pendidikan Kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, pergeseran tren kehidupan dalam diri pelajar di Indonesia menjadi sebuah masalah yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Berbagai kasus yang melibatkan remaja (sering disebut dengan kenakalan remaja) mulai mengkhawatirkan para orang tua. Persoalan ini pada dasarnya menjadi sebuah tanggung jawab utama untuk seluruh bagian dari pihak-pihak dalam sebuah lembaga pendidikan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia Indonesia saat ini, khususnya remaja, dihadapkan pada problema kemerosotan moral. Persoalan ini seolah-olah melengkapi persoalan yang sebelumnya sudah ada, seperti

lemahnya penegakan hukum, korupsi yang semakin merebak, kolusi dan nepotisme. Bahkan etika politik kalangan pejabat pemerintahan dan penyelenggara negara dewasa ini juga sangat mengecewakan rakyat. Ingkar janji hingga tidak mengabaikan suara rakyat sudah lumrah dilakukan oleh pejabat negara, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Sekedar contoh, problema yang menyangkut generasi muda Indonesia dewasa ini sering dilihat dan didengar dalam pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik, yang menyajikan persoalan kriminalitas yang dilakukan para remaja. Pesta minuman keras (miras), ganja, sabu, dan sejenisnya seolah-olah telah menjadi

konsumsi “wajib” bagi generasi muda. Belum lagi tawuran antar pelajar, pelecehan seksual, hingga yang paling ringan adalah kurangnya rasa hormat terhadap orang tua dan kurangnya rasa segan terhadap orang yang lebih tua.

Demikian juga dengan persoalan yang melibatkan kalangan elit politik penyelenggara pemerintahan yang seharusnya menjadi teladan, akan tetapi sikap dan perilaku mereka sendiri belum pantas untuk ditiru. Sekedar contoh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat Pansus, paripurna maupun rapat komisi, tidak jarang diwarnai oleh luapan ekspresi kekerasan, bahkan saling memaki dan berakhir pada perkelahian.

Jika didasarkan pada realita di atas, sungguh sangat ironis sekali. Kepada siapa lagi generasi muda harus meniru, sementara generasi di atas mereka yang seharusnya menjadi teladan belum bisa menunjukkan sikap yang patut untuk diteladani. Inilah yang disebut dengan krisis moral. Moral seolah-olah sudah tidak ada lagi. Moral tidak lagi diagungkan. Apa yang dibutuhkan dalam kondisi seperti ini? Jawabannya adalah pendidikan karakter. Jadi, berdasarkan realitas kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dewasa ini, yang dihinggapai berbagai krisis moral, maka menjadi sangat penting untuk direalisasikan pembangunan karakter bangsa melalui proses pendidikan. Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diharapkan dapat menjadi wahana pembangunan kembali karakter bangsa yang mulai terkikis.

Mengapa harus PKn? Salah satu misi yang diemban PKn adalah sebagai pendidikan karakter, disamping misi lain sebagai pendidikan politik / pendidikan demokrasi, pendidikan moral dan pendidikan hukum di setiap jenis dan jenjang pendidikan (Susiatik, 2013). Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, PKn (disamping Pendidikan Agama) memiliki posisi sebagai ujung tombak dalam pendidikan karakter. Maksudnya, dalam

kedua mata pelajaran tersebut pendidikan karakter harus menjadi tujuan pembelajaran.

Perubahan karakter peserta didik pada hakikatnya merupakan usaha yang disengaja/direncanakan (*instructional effect*), bukan sekedar dampak ikutan/pengiring (*nurturant effect*). Hal ini dapat ditunjukkan bahwa komponen PKn adalah pengetahuan, keterampilan dan karakter kewarganegaraan. Dengan kata lain, tanpa ada kebijakan pengintegrasian pendidikan karakter kedalam berbagai mata pelajaran, PKn pada hakikatnya harus mengembangkan pendidikan karakter. Lebih-lebih dengan adanya kebijakan pengembangan pendidikan karakter yang terintegrasi, ini merupakan tantangan untuk menunjukkan bahwa PKn sebagai ujung tombak yang tajambagi pendidikan karakter. Dalam penulisan ini difokuskan pada upaya untuk mengimplementasikan pendidikan karakter melalui pembelajaran PKn.

PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan diambil dari istilah *Civic Education*, dan oleh sebagian pakar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Istilah Pendidikan Kewargaan diwakili oleh Azyumardi Azra dan Tim ICCE (*Indonesian Center for Civic Education*), sedangkan istilah Pendidikan Kewarganegaraan diwakili oleh Zamroni, Muhammad Numan Soemantri, Udin. S. Winataputra, dan Tim CISED (*Center Indonesian for Civic Education*).

Rosyada, dkk (2000:7) memberikan pendapat bahwa, “Pendidikan Kewarganegaraan itu sama dengan Pendidikan Demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat untuk dapat berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa kesadaran demokrasi adalah bentuk kehidupan

masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat”.

Lebih lanjut, Rosyada, dkk (2000:7) memberi pengertian mengenai Pendidikan Kewarganegaraan yaitu; “Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki pengetahuan politik serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa”.

Sementara itu Merphin Panjaitan (Rosyada, dkk, 2007:8) memberikan definisi mengenai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut: “Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pendidikan Demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang diagonal”. Sedangkan Soedijarto (Rosyada, dkk, 2007:8) memberikan definisi tentang Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut: “Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pendidikan Politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik agar menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis”.

Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan itu pada hakikatnya adalah program pendidikan yang memuat bahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungannya dengan negara, demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan masyarakat madani yang dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan demokratis dan humanis.

Soemantri (dikutip oleh Rosyada, 2000:8) memberikan ciri-ciri mengenai PKn, yaitu: 1) PKn adalah kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah; 2) PKn meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang

dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis; dan, 3) Dalam PKn termasuk pula hal-hal yang menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi dan syarat-syarat objektif untuk hidup bernegara.

Sebagaimana lazimnya setiap pendidikan yang memiliki tujuan yang hendak di capai, demikian juga dengan PKn. Rosyada, dkk (2000:10) mengungkapkan tujuan PKn, antara lain sebagai berikut: 1) untuk membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik ditingkat lokal, nasional, regional, dan global; 2) Menjadikan warga masyarakat yang baik dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera, dan demokratis; 3) Menghasilkan mahasiswa yang berfikiran komprehensif, analitis, kritis, dan bertindak demokratis; 4) Mengembangkan kultur demokrasi, yaitu kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, kemampuan menahan diri, kemampuan mengambil keputusan, serta kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan politik kemasyarakatan; dan, 5) Mampu membentuk mahasiswa menjadi *good and responsible citizen* (warga negara yang baik dan bertanggungjawab) melalui penanaman moral dan keterampilan (*social skills*) sehingga kelak mereka mampu memahami dan memecahkan persoalan-persoalan aktual kewarganegaraan seperti toleransi, perbedaan pendapat, bersikap empati, menghargai pluralitas, kesadaran hukum dan tertib sosial, menjunjung tinggi HAM, mengembangkan demokratisasi dalam berbagai lapangan kehidupan, dan menghargai kearifan lokal (*local wisdom*). Pada hakikatnya, pengajaran PKn berbeda dengan pengajaran pendidikan lain, karena pengajaran PKn ini sulit untuk mendapatkan ketepatan jika dibanding dengan pengajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Dalam buku terbitan Ditjen. Dikdasmen, Depdiknas(2003:4), sebagaimana lazimnya

suatu bidang studi yang diajarkan di sekolah, PKn memiliki karakteristik yang mencakup 3 (tiga) dimensi, yaitu: 1) dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*knowledge*), yang mencakup bidang politik, hukum dan moral; 2) dimensi keterampilan kewarganegaraan (*Skills*), meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan 3) dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*values*), mencakup antara lain percaya diri, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur.

Karakteristik tersebut di atas dimaksudkan agar sejalan dengan ide pokok pelajaran PKn yang ingin membentuk warga negara yang ideal, yaitu warga negara yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berpengetahuan, berketerampilan, dan memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip Kewarganegaraan. Sikap inilah yang disebut dengan sikap yang berkarakter.

Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya (Kusuma, 2007:3). Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju kearah hidup yang lebih baik.

Wynne (dikutip oleh Zuchdi, 2009), menyatakan bahwa istilah karakter diambil dari bahasa Yunani yang berarti '*to mark*' (menandai). Istilah ini lebih difokuskan pada bagaimana upaya pengaplikasian nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku.

Lebih lanjut, Wynne mengatakan bahwa ada dua pengertian tentang karakter. *Kesatu*, karakter menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus, tentulah orang tersebut memmanifestasikan perilaku buruk atau

berkarakter buruk. Sebaliknya apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memmanifestasikan karakter mulia. *Kedua*, istilah karakter erat kaitannya dengan '*personality*'. Seseorang baru bisa disebut 'orang berkarakter' apabila tingkahlakunya sesuai kaidah moral (Zuchdi, 2009). Oleh sebab itu, menurut Lickona (1992), pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek '*knowing the good*', tetapi juga '*desiring the good*' atau '*loving the good*' dan '*acting the good*'.

Selain itu, karakter menurut Suyanto (2009) adalah sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Selanjutnya dikatakan juga bahwa karakter adalah '*the combination of qualities and personality that makes one person or thing different from others*' (dalam Hidayatullah, 2011). Selain itu, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1992), karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang lain.

Dengan demikian, secara umum karakter dapat dikatakan sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Secara psikologis dan *socio-cultural*, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, kognitif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi *social kultural* (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan *socio-cultural* tersebut dapat dikelompokkan dalam olah hati (*spiritual and emotional development*), olah pikir (*intellectual development*), olah raga dan kinestetik (*physical and kinesthetic*

development), dan olah rasa dan karsa (*affective and creativity development*) (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010).

Olah hati berkenaan dengan perasaan sikap dan keyakinan/keimanan menghasilkan karakter jujur dan bertanggung jawab. *Olah pikir* berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif menghasilkan pribadi cerdas. *Olah raga* berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas menghasilkan sikap bersih, sehat, dan menarik. *Olah rasa dan karsa* berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, citra, dan penciptaan kebaruan menghasilkan kepedulian dan kreatifitas.

Lahirnya pendidikan karakter bisa dikatakan sebagai sebuah usaha untuk menghidupkan spiritual yang ideal. Tujuan utama dari pendidikan karakter adalah untuk membentuk karakter itu sendiri, karena karakter merupakan suatu evaluasi seorang pribadi atau individu serta karakter pun dapat memberi kesatuan atas kekuatan dalam mengambil sikap di setiap situasi. Pendidikan karakter pun dapat dijadikan sebagai strategi untuk mengatasi pengalaman yang selalu berubah sehingga mampu membentuk identitas yang kokoh dari setiap individu. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa tujuan pendidikan karakter ialah untuk membentuk sikap yang dapat membawa kita kearah kemajuan tanpa harus bertentangan dengan norma yang berlaku. Pendidikan karakter pun dijadikan sebagai wahana sosialisasi karakter yang patut dimiliki setiap individu agar menjadikan mereka sebagai individu yang bermanfaat seluas-luasnya bagi lingkungan sekitar.

Dalam konteks suatu bangsa, karakter dimaknai sebagai nilai-nilai keutamaan yang melekat pada setiap individu warga negara dan kemudian menjejawantah sebagai

personalitas dan identitas kolektif bangsa. Karakter berfungsi sebagai kekuatan mental dan etik yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita kebangsaannya dan menampilkan keunggulan-keunggulan komparatif, kompetitif, dan dinamis di antara bangsa-bangsa lain. Karena itu, dalam pemaknaan demikian, manusia Indonesia yang berkarakter kuat adalah manusia yang memiliki sifat-sifat: religius, moderat, cerdas, dan mandiri. Sifat *religius* dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian taat beribadah, jujur, terpercaya, dermawan, saling tolong menolong, dan toleran. Sifat *moderat* dicirikan oleh sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian yang tengahan antara individu dan sosial, berorientasi materi dan ruhani, serta mampu hidup dan kerjasama dalam kemajemukan. Sifat *cerdas* dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian yang rasional, cinta ilmu, terbuka, dan berpikiran maju. Sikap *mandiri* dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian merdeka, disiplin tinggi, hemat, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, dan memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan universal dan hubungan antarperadaban bangsa-bangsa.

Menurut Kaelan (2010), untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang kuat pada hakikatnya harus didasarkan pada dasar filosofis bangsa. Bangsa Indonesia telah menentukan jalan kehidupan berbangsa dan bernegara pada suatu *'khitoh'* kenegaraan, *filosofischegrondslag* atau dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Karena itu, etika politik kenegaraan sebagai prasyarat membentuk karakter bangsa perlu disandarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila. Sebab sebagai dasar negara, Pancasila bukan merupakan suatu preferensi, melainkan sudah merupakan suatu realitas objektif bangsa dan negara Indonesia, yang memiliki *dasar legitimasi yuridis, filosofis, politis, historis dan kultural*.

Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Komitmen nasional tentang perlunya pendidikan karakter tertuang dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 3 yang dinyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Disini dapat diasumsikan bahwa pada umumnya sasaran pendidikan karakter adalah seluruh warga Negara dan secara khusus adalah peserta didik di setiap jenis dan jenjang pendidikan. Berkaitan dengan peserta didik, mereka dikatakan. Sebagai generasi penerus bangsa dan merupakan warganegara *hipotetik*, yakni warganegara yang “*belum jadi*”, karena masih harus dididik menjadi warganegara dewasa yang sadar akan hak dan kewajibannya. Di sisi lain, masyarakat sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk menjadi warganegara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya, bertanggung jawab, memiliki sopan santun, berkeadaban, menghormati orang lain, dan karakter lainnya. Salah satu media yang paling tepat untuk menghidupkan kembali karakter yang dimaksud adalah PKn, dalam artian bahwa nilai-nilai dalam pendidikan karakter diimplementasikan dalam PKn melalui proses integrasi.

Integrasi nilai pendidikan karakter adalah suatu sistem penanam nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang

Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Sementara itu, beberapa nilai yang perlu dikembangkan di dalam Pendidikan karakter adalah nilai ketaqwaan, nilai keimanan, nilai kejujuran, nilai kepedulian, hingga nilai etika atau sopansantun.

Jika nilai pendidikan karakter diimplementasikan melalui PKn, maka dapat dikatakan bahwa nilai-nilai karakter untuk PKn meliputi nilai karakter pokok dan nilai karakter utama. Nilai karakter pokok PKn yaitu untuk menciptakan peserta didik yang: religius, jujur, cerdas, tangguh, Kedemokratisan, dan peduli. Sedangkan nilai karakter utama PKn yaitu untuk menciptakan peserta didik yang: nasionalis, patuh pada aturan sosial, menghargai keberagaman, sadarkan hak dan kewajiban diri dan orang lain, bertanggung jawab, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, dan mandiri. Nilai-nilai karakter utama ini dapat dikembangkan lebih luas, untuk upaya memperkokoh fungsi PKn sebagai pendidikan karakter.

Sampai saat ini Pendidikan Kewarganegaraan sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praksis pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*”. Konfigurasi atau kerangka sistemik Pendidikan Kewarganegaraan dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut:

1. Pendidikan kewarganegaraan secara *kurikuler* dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga Negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggungjawab.
2. Pendidikan kewarganegaraan secara *teoretik* dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen*

atau saling terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

3. Pendidikan kewarganegaraan secara *programatik* dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai dan pengalaman belajar dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, jika berbicara mengenai implementasi pendidikan karakter melalui PKn di setiap jenis dan jenjang pendidikan dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Pendidikan karakter terintegrasi pada setiap materi PKn, dengan sendirinya setiap materi yang adadi beri bobot pendidikan karakter. Pendidik menyusun rencana pembelajaran dengan menautkan perilaku aspek nilai karakter pada indikator dan tujuan pembelajaran serta bahan belajar PKn.
2. Pelaksanaan pembelajaran PKn dengan bahan belajar tentang nilai karakter diuraikan pada proses belajar mengajar melalui 3 tahapan, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada pendahuluan perilaku karakter disajikan melalui apersepsi pada kegiatan sehari-hari peserta didik atau pengalaman mereka terhadap perilaku serta sikap. Selanjutnya dalam kegiatan inti disajikan melalui contoh atau penugasan sehingga secara langsung maupun tidak langsung peserta didik belajar berbagai perilaku tentang nilai karakter bersama peserta didik lainnya. Berikutnya pada kegiatan penutup disimpulkan perilaku apa saja yang harus dikusai peserta didik setelah

mempelajari konsep karakter. Jadi, dalam proses pembelajaran PKn, pendidik harus mampu menciptakan watak atau karakter kepada setiap peserta didik.

3. Evaluasi pembelajaran PKn yang menerapkan nilai-nilai karakter dilakukan pada pembentukan karakter. Dengan melihat hasil tugas mingguan yang berupa tugas peningkatankarakter/sikap yang dibuat oleh peserta didik, terlihat perubahan dan peningkatan pada diri mereka secara bertahap setiap minggunya. Berdasarkan hasil observasi kegiatan belajar didapatkan perubahan sikap yang cukup baik. Contoh, untuk membentuk karakter tanggung jawab, peserta didik yang tidak berpartisipasi dalam kerja kelompok diberi hukuman yang disepakati bersama.

Jadi dengan adanya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya dapat mempersiapkan para peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik dan cakap karakter, berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Pendidikan karakter bertujuan untuk kembali menghidupkan karakter warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, antara lain nilai ketaqwaan, nilai keimanan, nilai kejujuran, nilai kepedulian, hingga nilai etika atau sopansantun. PKn merupakan salah satu sarana yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai dalam pendidikan karakter kepada peserta didik, karena tujuan PKn pada dasarnya adalah untuk menciptakan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan karakter tepat diimplementasikan melalui PKn dalam membentuk akhlak generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. (2003). *Sistem Pendidikan Nasional*. www.depdiknas.go.id
- Hidayatullah, M.F. (2011). "Pendidikan Karakter dan Pengembangan Metode Pembelajaran Nilai". Bahan tayangan disampaikan dalam Pentaloka Doswar se-Jawa Tengah dan DIY di Dodik Bela Negara Resimen Kodam IV/Diponegoro Magelang, 12 April 2011.
- Kaelan, (2010). *Pendidikan pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma
- Kemendiknas. (2010). *Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen
- Kusuma A, Doni. (2007). *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Grasindo.
- Lickona, T. (1992). *Educating for Character*. New York: Bantam Books.
- Poerwadarminta, (1992). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rosyada, Dede. et.al. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Susiatik, Titik. (2013). "Pengaruh Pembelajaran PKn Terhadap Pembentukan Karakter Siswa". *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, vol: XX, No : 4, Oktober 2013.
- Suyanto. (2009). *Urgensi Pendidikan Karakter*. <http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/pages/urgensi.html>. diakses tanggal 12 Juli 2015-08-19
- Zuchdi, Darmiyati. (2009). *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: UNY Press